## Teori Partisipasi Politik

### Defenisi Partisipasi Politik

Dalam bukunya, *Political Sciology : A Critical Introduction,* Keith Fauls dalam Pengantar Sosiologi oleh Damsar, memberikan batasan partisipasi politik sebagai “keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan[17](#_bookmark16)”.

Beberapa sarjana merumuskan beberapa konsep partisipasi politik, yang disampaikan dalam tabel berikut[18](#_bookmark17) :

16 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Sosial.* Jakarta: LP3S,1989, hal.37.

17 Keith Fauls, *Political Sciology : A Critical Introduction* dalam Damsar, *Pengantar Sosioogi Politik* 1990, hal 180.

18 *mjieschool.multiply.com/journal/item/.../BUDAYA\_POLITIK*

TABEL 1

DEFENISI PARTISIPASI POLITIK MENURUT BEBERAPA AHLI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sarjana** | **Konsep** | **Indikator** |
| **Kevin R. Hardwick** | Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan- kepentingan mereka terhadap pejabat- pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut. | 1. Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah
2. Terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat publik.
 |
| **Miriam Budiardjo** | Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakanpemerintah (*public policy*). | 1. Berupa kegiatan individu atau kelompok
2. Bertujuan ikut aktif dalam ke-hidupan politik, memilih pim-pinan publik atau mempenga-ruhi kebijakan

publik. |
| **Ramlan Surbakti** | Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. | 1. Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik
2. Dilakukan oleh warga negara biasa
 |
|  | Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. |
| **Michael** | Partisipasi politik adalah keterlibatan | 1. Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik
2. Memiliki tingkatan- tingkatan partisipasi
 |
| **Rush dan** | individu sampai pada bermacam-macam |
| **Philip** | tingkatan di dalam sistem politik. |
| **Althoft** |  |
| **Huntington dan Nelson** | Partisipasi politik ... kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah. | 1. Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan
2. Memiliki tujuan mempengaruh kebijakan publik
3. Dilakukan oleh warga negara preman (biasa)
 |
| **Herbert McClosky** | Partisipasi politik adalah kegiatan- kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakanumum. | 1. Berupa kegiatan-kegiatan sukarela
2. Dilakukan oleh warga negara
3. Warga negara terlibat dalam proses-proses politik
 |

***Sumber:*** *mjieschool.multiply.com/journal/item/.../BUDAYA\_POLITIK*

Berdasarkan beberapa defenisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan beberapa sarjana ilmu politik tersebut, secara substansial menyatakan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan termanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh non-warga negara biasa.

Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak lepas dari campur tangan warga negara. Dan setiap keputusan yang diambil tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan warga negara. Oleh karena itu, partisipasi dari masyarakat itu sendiri penting adanya. Dalam negara-negara demokratis pada umumnya semakin tinggi partisipasi warga negara nya maka semakin baik pula[19](#_bookmark18), dengan kata lain masyarakat merasa terbeban untuk ikut berpartisipasi. Karena tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi. Hal ini berarti masyarakat sebagai pemilik mandate perduli terhadap setiap kebijakan atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Begitu juga sebaliknya apabila tingkat partisipasi masyarakat rendah maka hal ini dianggap kurang baik, karena masyarakatnya tidak perduli terhadap negaranya dan cenderung bersikap apatis, dan lebih mementingkan kepentingan pribadi serta kelompoknya. Kegiatan warga negara biasa dibagi dua yaitu mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.

Dari defenisi ini dapat ditarik beberapa kriteria dari pengertian partisipasi politik [20](#_bookmark19) :

1. Menyangkut kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau orientasi.

Jadi, partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang bersifat objektif dan bukan subjektif.

1. Kegiatan politik warga negara biasa atau perorangan sebagai warga negara biasa yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (perantara).

19 Miriam Budiardjo*, op.cit.,* hal. 3.

20 Kuskridho Ambardi, *op.cit.,* hal. 288-290.

1. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan bahkan penolakan juga terhadap keberadaan figur para pelaku politik dan pemerintah.
2. Kegiatan tersebut diarahkan kepada upaya mempengaruhi pemerintah tanpa perduli efek yang akan timbul gagal ataupun berhasil.
3. Kegiatan yang dilakukan dapat melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan (konvensional) maupun dengan cara yang diluar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (violence).
4. Partisipasi politik adalah kegiatan seseoranng atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.

### Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Secara umum bentuk-bentuk partisipasi sebagai kegiatan dibedakan sebagai berikut :

* + - 1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.

Artinya setiap orang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan public, mengajukan alternative kebijakan public yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.

* + - 1. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
			2. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap system politik yang ada telah menyimpang dari apa yang di cita-citakan.

Para ahli sosiologi politik telah merumuskan berbagai bentuk partisipasi politik.

Berikut disajikan bentuk-bentuk partisipasi politik menurut beberapa ahli.

### Michael Rush dan Philip Althoff

Dalam buku *Pengantar Sosiologi Politik*, Michael Rush dan Philip Althoff yang dikutip oleh Damsar dalam *Pengantar Sosiologi Politik* mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai suatu tipologi politik. Hirarki tertinggi dari partisipasi politik menurut Rush dan Althoff adalah menduduki jabatan politik atau administrative. Sedangkan hierarki yang terendah dari suatu partisipasi politik adalah orang yang apati secara total, yaitu orang yang tidak melakukan aktivitas politik apapun secara total. Semakin tinggi hierarki partisipasi politik maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan orang-orang, seperti yang diperlihatkan oleh Bagan Hierarki Partisipasi Politik[21](#_bookmark20), dimana garis vertikal segitiga menunjukkan hierarki, sedangkan garis horizontalnya menunjukkan kuantitas dari keterlibatan orang-orang.

21 Rush, Althoff, *Pengantar Sosioogi Politik* dalam *Pengantar Sosioogi Politik* oleh Damsar *Op.cit.,*hal. 185.

### Gambar I Hierarki Partisipasi Politik

Menduduki jabatan politik atau administrative. Mencari jabatan politik atau administrative.

Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainy Partisipasi dalam diskusi politik informal.

Partisipasi dalam pemungutan suara (voting). Apati total.

***Sumber:*** *Rush dan Althoff (2003) dalam Damsar (2010),* hal. 185.

### Samuel P.Huntington dan Juan M.Nelson

Samuel P.Huntington dan Juan M. Nelson[22](#_bookmark21)

menemukan bentuk-bentuk partisipasi

politik yang berbeda. Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik meliputi :

* 1. Kegiatan Pemillihan, mencakup suara, juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seoranng calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
	2. Lobbying, mencakup upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud

22 *Ibid.,* hal. 188-190.

mempengaruhi keputusan politik mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

* 1. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
	2. Mencari koneksi, merupakan tindakan peorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu atau segelintir orang.
	3. Tindak kekerasan, merupakan upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbukan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

### Gabriel A. Almond

Dalam buku *Perbandingan Sistem Politik* yang disunting oleh Mas’oed dan MacAndrews dalam Damsar[23](#_bookmark22), Almond membedakan partisipasi atas dua bentuk, yaitu :

* 1. Partisipasi Politik konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang “normal“ dalam demokrasi modern.
	2. Partisipasi politik nonkonvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan illegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Adapun rincian dari pandagan Almond tentang dua bentuk partisipasi dapat dilihat pada tabel berikut :

23 *Ibid.,* hal. 186.

TABEL 2

BENTUK-BENTUK PARTISIPASI POLITIK

|  |  |
| --- | --- |
| Konvensional | Non Konvensional |
|  Pemberian suara (*voting*) |  | Pengajuan Petisi |
|  | Diskusi Politik |  | Berdemonstrasi |
|  Membentuk dan bergabung dalamkelompok kepentingan |  | Konfrontasi |
|  Komunikasi individual denganpejabat politik dan administratif |  | Mogok |
|  |  | Tindak kekerasan politik terhadap hartabenda(perusakan,pengeboman,pembakaran) |
|  |  Tindakan kekerasan politik terhadp manusia (penculikkan,pembunuhan) perang gerilyadan revolusi. |

***Sumber:*** *Almond dalam Mas’oed dan MacAndrews (1981) dalam Damsar (2010),* hal. 186

## Teori Pemilihan Umum

### Pemilihan Umum

Secara universal pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan *(representative goverment)*[*24*](#_bookmark23)**.** Pemilihan umum disebut juga dengan *‘’political market’’* sebagaimana yang diungkapkan Indria Samego[25](#_bookmark24), artinya pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio), maupun audio visual (televisi), serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran, bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau lobby yang berisi janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pillihannya terhadap salah satu partai politik yang

24 Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992, hal. 33.

25 Samego Indria , *Book Review Ekonomi Politik,* Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta. 2000.

menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislative maupun eksekutif.

Adapun tujuan pemilihan umum[26](#_bookmark25), menurut Undang-Undang No.23 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintah negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas pemilu menurut UU No.23 tahun 2003, tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden[27](#_bookmark26) meliput i :

* + - 1. Langsung

Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

* + - 1. Umum

Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi.

* + - 1. Bebas

Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapa pun/dengan apa pun.

* + - 1. Rahasia

Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan.

26 *Op.cit.,*hal.148.

27 *Op.cit.,* hal. 150

* + - 1. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pelaksana, peerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, haru bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

* + - 1. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

### Sistem Pemilihan Umum

1. Sistem Distrik

Kriteria utama dari sistem distrik ini adalah wilayah negara dibagi-bagi dalam distrik- distrik pemilihan atau daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang diperebutkan. Ciri pokok dari sistem pemilihan distrik ini adalah yang menjadi fokus pemilihan bukanlah organisasi politik, melainkan individu yang mewakili atau yang dicalonkan oleh partai politik dari suatu distrik. Orang yang dicalonkan biasanya warga distrik tersebut yang sudah dikenal baik oleh warga distrik yang bersangkutan. Jadi, hubungan antara si pemilih dengan si calon cukup dekat[28](#_bookmark27).

System distrik ini mempunyai kelemahan yaitu :

* + - 1. Sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpencar dalam beberapa distrik.

28 Nazzarudin, Sjamsuddin, 1993, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Gramedia: Jakarta, hal. 143.

* + - 1. Sistem ini kurang representative dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali.

Disamping kelemahan-kelemahan tersebut diatas, system ini juga memiliki kelebihan :

1. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat. Dengan demikian dia akan terdorong untuk memperjuangkan kepentingan distrik.
2. Sistem ini lebih mendorong proses integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.
3. Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara partai-partai mempermudah terbentuknya pemerintah yang stabil dan mempertingkat stabilitas nasional.
4. Sistem ini sederhana dan mudah diselenggarakan.
5. Sistem Perwakilan Berimbang

Dalam system ini setiap suara yang diperoleh oleh suatu partai atau golongan dalam sesuatu daerah pemilihan dapat ditambahkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai atau golongan itu dalam daerah pemilihan lain, untuk menggenapkan jumalah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tambahan. Sistem ini memiliki kekurangan yaitu :

1. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru. System ini tidak menjurus pada proses integrasi bermacam-macam golongan dalam masyarakat, mereka lebih cenderung untuk mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada dan kurang terdorong untuk mencari dan memanfaatkan persamaan-persamaan. System ini dianggap mempunyai akibat memperbanyak jumlah partai.
2. Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa partai lebih menonjol peranannya daripada kepribadian seseorang.
3. Banyaknya partai mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil, oleh karena umumnya harus mendasarkan diri atas koalisi dari dua partai atau lebih.

Adapun kelebihan dari system ini adalah setiap suara turut diperhitungkan dan praktis tidak ada suara yang hilang. Golongan-golongan keccil pun dapat menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan rakyat.

## Teori Perilaku Politik

### Defenisi Perilaku Politik

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik[30](#_bookmark29). Interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, antar lembaga pemerintah dan antar kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. Perilaku politik dapat dijumpai didalam negara misalnya, ada pihak yang memerintah dan yang diperintah. Pada dasarnya, manusia yang melakukan kegiatan dibagi menjadi dua, yakni warga negara yang memiliki fungsi pemerintahan (penjabat pemerintahan), dan warga negara biasa yang tidak memiliki fungsi pemerintahan tetapi memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang memiliki fungsi pemerintahan (fungsi politik). Suatu tindakan dan keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh fungsi (tugas dan wewenang) yang melekat pada lembaga yang mengeluarkan keputusan (sedangkan fungsi itu sendiri merupakan upaya mencapai tujuan masyarakat, negara atau nilai-nilai politik), tetapi juga dipengaruhi oleh kepribadian (keinginan dan dorongan, persepsi dan motivasi, sikap dan orientasi, harapan dan cita-cita, ketakutan dan pengalaman masa lalu) individu yang membuat keputusan tersebut[31](#_bookmark30).

Perilaku politik berkenaan dengan tujuan masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta system kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat secara umum dan bukan tujuan perorangan. Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan sikap politik. yakni yang berkaitan dengan kesiapan bereaksi terjadap objek lingkungan tertentu suatu penghayatan terhadap objek tersebut[32](#_bookmark31).

30 Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik,* Jakarta : Gramedia Widya Sarana, 1992, hal.131.

31 *ibid*

32 Sudijono, Sastroatmodjo, *op.cit.,* hal. 4.

Perilaku politik tidaklah sesuatu yang dapat berdiri tegak sendiri tetapi mengandung keterkaitan dengan hal yang lain. Salah satu hal yang penting adalah sikap politik. sikap dan perilaku sangat erat hubungannya, namun keduanya dibedakan. Sikap merupakan kesiapan untuk berekasi terhadap objek lingkungan tertentu. Sikap belum merupakan tindakan tetapi masih berupa suatu kecenderungan.

Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya yang mengelilinginya. Menurut Jack C. Plano dkk dalam Moh. Ridwan[33](#_bookmark32), perilaku politik adalah:

*“Pikiran dan tindakan manusia yang berkaitan dengan proses memerintah. Yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan-tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap dan keyakinan) dan juga tindakan-tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerak protes, lobbying, kaukus, kampanye dan demonstrasi)”.*

### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik[34](#_bookmark33)

***Pertama***, perlu dipahami dalam konteks latar belakang histories. Sikap dan perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh proses-proses dan peristiwa historis masa lalu. Hal ini disebabkab budaya politik tidak merupakan kenyataan yang statis melainkan berubah dan berkembang sepanjang masa.

***Kedua***, faktor kondisi geografis memberikan pengaruh dalam perilaku politik masyarakat sebagai kawasan geostrategis, walaupun kemajemukan budaya Indonesia merupakan hal yang rawan bagi terciptanya disintegrasi. Kondisi ini mempengaruhi perbedaan tingkat partisipasi politik masyarakat, kesenjangan pemerataan bangunan, kesenjangan informasi, komunikasi, teknologi mempengaruhi proses sosialisasi politik.

33 Ridwan, Moh. 1997. *Perilaku Politik NU Pasca Pernyataan Kembali ke Khittah 1926*. Skripsi.

34 Asep Ridwan, *Memahami Perilaku Pemilih Pada Pemilu 2004,* Jurnal Demokrasi dan HAM Jakarta : The Habibie Center,2000, hal. 25.

***Ketiga***, factor budaya politik memiliki pengaruh dalam perilaku politik masyarakat. Berfungsinya budaya politik ditentukan oleh tingkat keserasian antara kebudayaan bangsa dan struktur politiknya. Kemajuan budaya Indonesia memepengaruhi budaya budi bangsa. Berbagai budaya daerah pada masyarakat Indonesia berimplikasi pada terciptanya sebuah bentuk perilaku politik dengan memahami budaya politik masyarakat yang dipandang penting untuk memahami perilaku politik.

***Keempat,*** perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh agama dan keyakinan. Agama telah memberikan nilai etika dan moral politik yang memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam perilaku politiknya. Keyakinan merupakan acuan yang penuh dengan norma-norma dan kaidah yang dapat mendorong dan mengarahkan perilaku politik sesuai agama dan keyakinannya proses politik dan partisipasi warga negara paling tidak dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pemahaman agama seseorang.

***Kelima,*** pendidikan dan komunikasi juga mempengaruhi perilaku politik seseorang. Semakin tinggi pendiidkan masyarakat maka semakin tinggi tingkat kesadaran politiknya. Komunikasi yang intens akan mempengaruhi perilaku politik seseorang dalam kegiatan politiknya.

***Keenam,*** factor kepribadian mempengaruhi perilaku politik.

***Ketujuh***, factor lingkungan social politik. faktor ini mempengaruhi aktor politik secara langsung seperti keadaan keluarga, cuaca, ancaman. Lingkungan sosial politik saling memepengaruhi dan berhubungan satu dengan yang lain dan bukannya sebagai factor yang berdiri sendiri.

Selain faktor-faktor diatas ada lima faktor lain yang memainkan peranan penting dalam memnetukan pilihan rakyat, yaitu : standar hidup, kondisi gaji atau tidak digaji, kelompok umur, seks, tingkat pendidikan, agama, simpati terhadap partai politik.

### Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Perilaku politik dilihat sebagai sebuah alat analisis untuk melihat bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi di dalam pemilihan umum, baik itu melalui pemberian suara (voting), keikutsertaan seseorang dalam kampanye, dan keanggotaan seseorang dalam partai politik. Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dilihat sebagai berikut.

* + - 1. **Kampanye**

Kampanye adalah sebuah tindakan [politik](http://id.wikipedia.org/wiki/Politik) bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu [kelompok](http://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok), kampanye biasa juga dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian[35](#_bookmark34). Sebagaimana yang dikutip di dalam buku perilaku partai politik M.Khoirul Anwar[36](#_bookmark35), kampanye juga dapat diartikan sebagai strategi kontrol sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan pada saatnya menuruti apa yang di programkan oleh partai politik. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu termasuk mengajak memilih seseorang atau partai tertentu. Kampanye pemilu merupakan kampanye jangka pendek, yang mana ajang kompetisi jangka pendek menjelang pemilu untuk mengingatkan, membentuk dan mengarahkan opini public dalam waktu singkat.

Menurut Lock dan Harris[37](#_bookmark36) didalam Firmanszah kampanye politik terkait erat dengan pembentukan image politik. Dalam kampanye politik terdapat dua hubungan yang akan dibangun, yaitu internal dan eksternal. Hubungan internal adalah suatu proses antara anggota- anggota partai dengan pendukung untuk memperkuat ikatan ideologis dan identitas mereka. Sementara hubungan eksternal dilakukan untuk mengkomunikasikan image yang akan dibangun kepada pihak luar partai, termasuk media massa dan masyarakat secara luas. Image

35 [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com/)

36 Anwar, Khoirul, *Perilaku Partai Politik,* Penerbit : Universitas Muhammadiyah Malang, 2006, hal.40.

37 Firmanzah, *Marketing Politik*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal.272-274.

politik yang akan dibangun harus memiliki karakteristik sendiri dibandingkan dengan para pesaing. Kampanye pemilu yang merupakan aktifitas politik ditujukan untuk menggiring pemilih ke tempat-tempat pencoblosan. Sementara kampanye politik bersifat jangka panjang dan dilakukan secara terus menerus untuk membangun image politik. Image politik yang telah terbangun melalui proses interaksi terus menerus dengan masyarakat tidak mudah hilang dari memori kolektif masyarakat. Sedangkan janji dan harapan politik yang diberikan partai politik semasa kampanye pemilu hanya akan diingat, ditagih selama periode kepemimpinan partai tersebut kalau mereka memenangkan pemilu. Kampanye pemilu adalah sebahagian kecil dari kampanye politik. Meskipun suatu partai atau seorang kandidat tidak berada dalam periode kampanye pemilu, setiap ucapan, tindakan, bahasa tubuh, pemikiran dan aktivitas politik dianalisis oleh media massa dan masyarakat. Sebagaimana yang dituliskan Gelaman King dalam studinya menemukan bahwa preferensi pemilih akan kandidat tertentu sudah terbentuk jauh hari sebelum kampanye pemilu dimulai. Preferensi pemilih tidak dapat dibentuk hanya dengan kampanye yang bersifat jangka pendek.

Larl Popper dalam Dan Nimmo[38](#_bookmark37) mengemukakan tentang *Teori Pelopor Mengenai Opini Publik,* yang intinya para pemimpin menciptakan opini public karena mereka berhasil membuat beberapa gagasan yang mula-mula ditolak, kemudian di pertimbangkan dan akhirnya diterima. Dapat dipahami bahwa seorang pemimpin harus mampu membaca apa keinginan masyarakat. Seorang calon pemimpin itu harus memiliki kemampuan baik dalam seni berbicara maupun akalnya. Kegiatan kampanye pemilu merupakan sebuah proses untuk mengajak masayarakat (konstituen) untuk bersedia menerima, mendukung dan memilih partai/calon yang diusung. Calon yang di usung ini harus memiliki kemampuan bahasa yang baik, mennyampaikan pesan politiknya sesuai dengan keadaan masyarakatnya, misalnya berdasarkan demografisnya. Calon yang diusung pun harus memiliki target di dalam

38 Nimmo, Dan, *Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan, dan Media*, Bandung : Remadja Rosda Karya, cetakan ke empat.

kampanye. Siapa-siapa saja yang hendak dijangkau, dan bagaimana strategi yang efektif, melalui media apa. Dan yang tidak kalah penting adalah dalam kampanye ini calon harus memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Jenis-jenis kampanye dapat dilihat sebagai berikut[39](#_bookmark38) :

* + - * 1. Product-oriented campaigns atau kampanye yang berorientasi pada produk umumnya terjadi di lingkungan bisnis. Istilah lain yang sering dipertukarkan dengan kampanye jenis ini adalah commercial campaign atau coporate campaign. Motivasi yang mendasarinya adalah memperoleh keuntungan financial.
				2. Candidate-oriented campaigns atau kampanye yang berorientasi pada kandidat umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasan politik. Karena itu jenis kampanye ini dapat pula disebut sebagai political campaigns (kampanye politik). Tujuannya antara lain adalah untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang diperebutkan lewat proses pemilihan umum.
				3. *Ideologically or cause oriented campaigns* adalah jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan social. Karena itu kampanye jenis ini disebutsebagai social change campaigns, yakni kampanye untuk menangani masalah-masalah social melalui perubahan sikap dan perilaku publik yang terkait.

39 Antar Venus, *Manajemen Kampanye*, Bandung : Simbiosa Rekatama Media,2009, hal.11.

* + - 1. **Pemberian Suara**

Richard G. Niemi dan Herbrt F.Weisberg[40](#_bookmark39)

yang dikutip dalam komunitas embun

pagi berpendapat bahwa faktor sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku memilih seseorang, bukan karena karakteristik sosiologis. Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologis (terutama konsep sosialisasi dan sikap) untuk menjelaskan perilaku seseorang. Pendekatan ini berkeyakinan bahwa pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari sosialisasi yang mereka terima. Maka dalam hal ini diperlukan “kurikulum sosialisasi politik”. Ini penting terutama bagi pemilih pemula yang cenderung belum pernah memilih. Harus dilakukan sosialisasi yang sistematis agar pemilih pemula ini dapat mengerti dan tidak menunjukkan karakter yang apatis (tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik), anomi (perasaan tidak berguna). Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinat dalam partisipasi politik masyarakat, artinya berbagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

* + - 1. **Partai Politik**
	1. **Defenisi Partai Politik**[**41**](#_bookmark40)
1. Menurut Miriam Budhiardjo

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota- anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan yang mereka miliki.

40 Richard G. Niemi dan Herbrt F.Weisberg, *Controversier of Voting Behavior* yang dikutip di dalam komunitas embun pagi.

41 A. Rahman, *op.cit*., hal. 102

1. Menurut Carl J. Friedrich

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.

1. Menurut R.H. Soltau

Partai politik adalah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

* 1. **Asal Usul Partai Politik**

Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik[42](#_bookmark41). Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historic yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu system politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politk sebagai produk modernisasi social ekonomi.

Teori yang pertama mengatakan bahwa partai politik dibentuk oleh kalagan legislative dan eksekutif karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontrak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Setelah partai politik menjalankan fungsi, kemudian muncul partai pollitik lain yangn dibentuk oleh kalangan masyarakat. Masyarakat membentuk partai politik sebagai alat untuk memobilisasi massa untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

42 Ramlan Surbakti, *Op.cit.,* hal.113

Teori kedua menjelaskan krisis situasi historis terjadi manakala suatu system politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modrn yang berstruktur kompleks.pada situasi ini terjadi perubahan, penambahan penduduk, perluasa.

Teori ketiga melihat modernisasi social ekonomi seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi dan lain-lain yang pada akhirnya mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Dengan demikian teori kedua dan ketiga memiliki kesamaan yakni partai politik berkaitan dengan perubahan yang ditimbulkan oleh modernisasi. Perbedaan kedua teori ini terletak dalam proses pembentukannya.

* 1. **Perkembangan Partai Politik di Indonesia**

Perkembangan partai politik di Indonesia mengalami pasang-surut seiring dengan perjalanan demokrasi. Berawal dari maklumat Wakil pemerintah No.X, 3 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Mohammad Hatta merupakan titik awal terbentuknya sistem multipartai di Indonesia. Pergeseran sistem kepartaian di Indonesia berawal dari multipartai (pada masa awal kemerdekaan) hingga kembali lagi ke sistem multiparatai di era reformasi. Dalam perjalanannya terjadi proses penyederhanaan kepartaian pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Struktur kepartaian kini kembali lagi ke sistem multipartai seiring dengan bergulirnya reformasi politik pasca rezim Orde Baru berkuasa. Dengan demikian, sejarah pergeseran sistem kepartaian di Indonesia adalah dari multipartai ke multipartai[43](#_bookmark42).

43 Hanta Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati,* Jakarta Gramedia Pustaka Utama, hal. 101.

* 1. **Tujuan dan Fungsi partai politik**[**47**](#_bookmark46)

Tujuan partai politik dapat dilihat sebagai berikut :

1. Untuk menjadi wadah aktualisasi diri bagian warga negara yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut serta dalam partisipasi politik.
2. Untuk menjadi wadah agregasi kepentingan masyarakat.

46 Ign. Ismanto dkk, *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004 : Dokumen Analisis, dan Kritik, 2004* dalam Hanta Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati,*2010., hal. 118.

47 A. Rahman, *op.cit.,* hal. 103-104.

1. Untuk menjadi sarana dalam upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan politik.
2. Untuk menjadi wadah berhimpun bagi masyarakat atau kelompok yang memiliki ideology dan kepentingan yang sama.

Fungsi partai politik yang melekat dalam suatu partai politik meliputi :

1. Sosialisasi Politik, adalah fungsi sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada.
2. Partisipasi Politik, adalah fungsi yang dimiliki oleh partai politik untuk mendorong masyarakat agar ikut aktif dalam kegiatan politik.
3. Komunikasi Politik, adalah fungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa.
4. Artikulasi Kepentingan, adalah fungsi menyatakan atau menyampaikan kepentingan konstituen kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama.
5. Agregasi Kepentingan, merupakan fungsi partai politik untuk memadukan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan diusulkan kepada badan legislative dan calon- calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar- menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan menawarkan pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan itu mau mendukung calon tersebut.
6. Pembuat Kebijaksanaan, memrupakan fungsi yang dimiliki partai politik setelah partai politik meraih dan mempertahankan kembali kekuasaan dalam

pemerintahan secara konstitusional. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan di lembaga eksekutif maupun legislative. Setelah memperoleh kekuasaan ini, maka partai politik memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijaksanaan yang akan digunakan dalam suatu pemerintahan.

* 1. **Sistem Kepartaian**

Sistem kepartaian ialah pola perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik[48](#_bookmark47).

* + 1. **Perjalanan Sistem Kepartaian**

Perjalanan kepartaian di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perjalanan demokrasi. Pergeseran system kepartaian di Indonesia berawal dari multipartai (pada masa awal kemerdekaan) hingga kembali lagi ke system multipartai di era reformasi. Dalam perjalanannya terjadi proses penyederhanaan kepartaian pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Struktur kepartaian kini kembali lagi ke system multipartai seiring dengan bergulirnya reformasi politik pasca rezim Orde Baru berkuasa. Dengan demikian, sejarah pergeseran system kepartaian di Indonesia adalah dari multipartai ke multipartai. System kepartaian menjadi sebuah mekanisme perwakilan yang mencerminkan keanekaragaman kepentingan dan aspirasi di masyarakat. Komposisi masyarakat yang memiliki tingkat kemajemukan cukkup tinggi ini paling cocok dan representative dengan system multipartai. Harapannya, system multipartai lebih mampu mencerminkan kekuatan-kekuatan di masyarakat[49](#_bookmark48).

Sistem kepartaian adalah “pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil, yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap negara.” Sistem kepartaian bergantung pada jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, ia juga bergantung pada

48 *Ibid.,* hal. 124

49 Hanta Yuda, *op.cit*., hal 101-103

kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik. Selain itu, sistem-sistem politik yang telah disebutkan, turut mempengaruhi sistem kepartaian yang ada. Peter Mair mengklasifikasikannya dalam tabel berikut[50](#_bookmark49).

### TABEL 5 SISTEM KEPARTAIAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENELITI | KRITERIA KLASIFIKASI | SISTEM KEPARTAIAN |
| Giovani Sartori (1976) | Jumlah Partai Jarak ideologi | * System dua partai
* Pluralisme moderat
* Pluralisme terpolarisasi
* System partai

berkuasa |

***Sumber:*** *Peter Mair (1996) dalam wikipedia*

Dalam tipologi Sartori[51](#_bookmark50), dia mengansumsikan hanya ada satu arena persaingan politik. Dengan demikian ia mengabaikan kemungkinan pemisahan antara arena Pemilu dan arena legislative, termasuk arena pemerintah. Sartori berargumen bahwa hasil-hasil pemilu akan menentukan tindakan partai di arena legislative. Dengan kata lain, Sartori mengandaikan perilaku partai dalam dua arena tersebut konsisten dari waktu ke waktu. Berbagai keuntungan di arena Pemilu akan membentuk perilaku partai di arena legislative. Partai-partai parlemen dengan demikian dilihat sebagai konsekuensi dari kebutuhan untuk bertarung dan memenangi pemilu. Partai-partai di legislative sebahagian besar muncul sebagai akibat dari nilai fungsional partai pada waktu Pemilu. Konsep Sartori tentang jarak ideologis untuk menggambarkan interaksi antar partai di arena persaingan yang berbeda.

50Peter Mair, *Party Systems and Structures of Competition*, dalam Lawrence LeDuc, ed., et.al., Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective, (California: Sage Publications, 1996) p.93 dalam Wikipedia.

51 Kuskridho Ambardi, *Op.cit.,* hal.11-15.

Dengan demikian sangat mungkin berbagai partai politik memperlihatkan polarisasi ideologis di satu arena dan kemudian bersekutu di arena lain.